

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;

Pemimpin Redaksi
(*Editor*) : Firdaus, S.Sos., M.H.
Anggota Dewan Redaksi
(*Section Editor*) : 1. Ahyar, S.H., M.H.
2. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
3. Dr. Irawati Handayani
4. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
5. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.
6. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
7. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si
8. Donny Michael, S.H., M.H.

Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris : 1. Ibnu Prasetyo, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.

Penyunting Tata Bahasa dan Naskah
(*Copyeditor*) : 1. Amirah Balqis S.H.
2. Novzel Ridho Abednego Hasugian
3. Mira Sukmawati

Teknologi Sistem Informasi : 1. Machyudhie, S.T.
2. Mochamad Arip, S.Kom.
3. Harysandy Permana, S.Kom.
4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib meng-upload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada e-journal. balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi (<i>Equality Of The Right To Education To The Application Of The Zoning System</i>)	179-192
Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita	
Deradikalisasi Narapidana Teroris Melalui <i>Individual Treatment</i> (<i>Deradicalization Of Terrorist Prisoners Through Individual Treatment</i>)	193-208
Yuliyanto, Donny Michael, Penny Naluria Utami	
<i>Quo Vadis</i> Komisi Nasional Disabilitas? (<i>Quo Vadis National Disability Commission?</i>)	209-226
Yeni Rosdianti	
Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945 (<i>The Ideas Of The Food Constitution: The Urgency Of Regulatory Rights To The Food Of Citizens In The Fifth Amendment Of The 1945 Constitution</i>)	227-244
Putra Perdana Ahmad Saifulloh	
Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja Di Surabaya (<i>The Human Rights Guarantee for Domestic Workers through a Work Agreement in Surabaya</i>)	245-260
Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatiningih, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba	
Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional (<i>Protection of Women's Human Rights Against Cases of Households Violence in Indonesia Based on the Perspective of International Law</i>)	261-272
Rifa' Rosyaadah; Rahayu	
Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (<i>Womens Political Rights Fulfilment to become Supervisor The 2020 Simultaneous Regional Heads Election</i>)	273-284
Ricky Santoso Muharam, Danang Prasetyo	
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru (<i>Fulfillment of Human Right In The Program Of Women Inmate's Self-Reliance Development in The New Normal Era</i>)	285-304
Frischa Mentari Safrin	

Pembatasan Hak Untuk Bergerak (<i>Right To Move</i>) Melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia (<i>Limitation Of The Rights To Move Through Entry Regulation And Travel Restrictions During Covid-19 Virus Outbreak Under International Law And Indonesian Law</i>)	305-324
Ari Wirya Dinata, M. Yusuf Akbar	
Pelanggaran HAM dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral antara Konsorsium Perusahaan Tiongkok dan Pemerintah Kongo (Human Rights Violation in the Mining Exploration Cooperation between Chinese Consortium Companies and the Government of Democratic Republic of Congo)	325-348
Witri Elvianti, Dibyana Galih Prakasita	
BIODATA PENULIS	xxix

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 12 Nomor 2, Agustus 2021. Seperti terbitan sebelumnya, pada edisi ini dimuat 10 (sepuluh) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Volume 12 Nomor 2, Agustus 2021 kali ini, dibuka dengan tulisan yang mengulas isu terkini yaitu Persamaan Hak atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi. Ada juga tulisan yang membahas Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui *Individual Treatment*, *Quo Vadis* Komisi Nasional Disabilitas, Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945, Jaminan HAM bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya, Perlindungan HAM Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional, Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Pemenuhan HAM dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru, Pembatasan Hak Bergerak (*Right to Move*) melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan selama Penyebaran Virus COVID-19 menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia, dan Pelanggaran HAM dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral antara Konsorsium Perusahaan China dan Pemerintah Kongo.

Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

=REDAKSI=

HALAMAN KOSONG

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
2. Prof. Muhammad Mustofa, M.A.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
3. Dr. Ani Purwanti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
4. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta
5. Nurhdayatuloh, SHI., Sp. PD., SH., LL.M., MH., MHI.
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
6. Eko Riyadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

HALAMAN KOSONG

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita

(Equality Of The Right To Education To The Application Of The Zoning System)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 179-192

Clusterization that arises because of the zoning, affirmation, and transfer of parents/guardians has harmful implications on the right to education, especially in choosing educational facilities freely. The percentage of zoning hampers it through the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 1 of 2021. The problem of rights to education arises because it has priority on the 'distance' aspect over the 'cognitive' aspect. Even, there is less educational opportunity for those coming from low economic class families through the zoning system. The research method used is normative juridical with a statutory approach. This research aims to examine the problem of rights to education since the implementation of the zoning system. The results showed that the application of this policy implicates the unfulfillment of the right to education as stipulated by Article 28C paragraph (1) and Article 31 paragraph (2) of the Constitution of 1945. The process of new students admission should consider 'score', then the affirmation method, and the method of transfer of guardians to create proportional and equitable education rights.

Keywords: *zoning; rights; education.*

Yuliyanto, Donny Michael, Penny Naluria Utami

(Deradicalization Of Terrorist Prisoners Through Individual Treatment)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 193-208

With the rise of radicalism carried out by terrorists, both individuals and groups, if no severe treatment is taken, the negative impact will be more widespread. This study aims to determine and analyze the application of individual treatment toward terrorist inmates. This study uses an empirical juridical approach. Primary data in this study was obtained through in-depth interviews with several stakeholders. Meanwhile, secondary data is obtained through regulations related to the development of terrorist prisoners. This study found that deradicalization of terrorist prisoners through individual treatment was carried out with personality development which included fostering religious awareness, national and state awareness, legal awareness, and counseling. Coaching is carried out individually in the prison room/cell. Meanwhile, the sorting of prisoners in the context of placement is based on an assessment of the risk level of each prisoner. Therefore, the scope of this research is a personality development program for terrorist prisoners through individual treatment. Through this research, the authors would like to contribute to the Ministry of Law and Human Rights, especially the Directorate General of Corrections, to improve the quality of coaching for terrorist prisoners; and build cooperation with other agencies in dealing with terrorist prisoners in Indonesia.

Keywords: *deradicalization; terrorist prisoners; individual treatment.*

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Yeni Rosdianti

(Quo Vadis National Disability Commission?)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 209-226

The enactment of Presidential Regulation Number 68 of 2020 concerning The National Disability Commission has brought concerns among disability activists nationwide. It reinvites an ambivalence about disability as social affairs over disability as human rights affairs where the National Disability Commission secretariat has been placed administratively under the Ministry of Social Affairs. This paper employs normative juridical review, which applies a deductive approach in analysing related data and statutory. This paper outlines the human rights-based approach on The National Disability Commission as mandated by the law. It also considers the United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and Paris Principles as a soft law that specifically deals with the provision of the establishment of National Human Rights Institutions. This study found that Presidential Regulation Number 68 of 2020 is somewhat disjoint with the overall purpose of human rights approach on disability. In addition, this paper suggests to strengthen National Disability Commission through a broad mandate specifying its composition and its sphere of competence, considering disability as interrelated fields instead of merely social affairs. This national institution should be vested with the aptitude to promote and protect human rights.

Keywords: persons with disabilities; human rights; national disability commission; disability rights.

Putra Perdana Ahmad Saifulloh

(The Ideas Of The Food Constitution: The Urgency Of Regulatory Rights To The Food Of Citizens In The Fifth Amendment Of The 1945 Constitution)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 227-244

Based on a poor portrait of the fulfilment of the right to food, this study proposes to strengthen the norm of guaranteeing the protection and fulfilment of the right to food in the plan for the Fifth Amendment to the 1945 Constitution. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study said that the 1945 Constitution has weaknesses, especially the arrangements in guaranteeing, fulfilling and protecting the right to food which were not explicitly regulated. This study is reinforced by the facts of several cases of food crises in Indonesia, justifying that the existence of the right to urgent food is contained in the Fifth Amendment to the 1945 Constitution to strengthen the right to food in the constitution and the constitutional amendments should guarantee the availability of agricultural land in order to achieve food security. In the amendment, the author believes that there should be legal certainty to citizens so that their rights in the food sector are more secure on the latest revision of The 1945 Constitution.

Keywords: food constitution; fifth amendment to the 1945 constitution; right to food.

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatningsih, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba

(The Human Rights Guarantee for Domestic Workers through a Work Agreement in Surabaya)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 245-260

One of problems with the domestic worker is the lack of human rights guarantee. It can be seen in Law Number 13 of 2003, which does not cover domestic workers. It means that there is no labour protection for domestic workers. Moreover, the relationship between domestic workers and employers is informal, so there are no legal provisions to regulate their relationship. The formulation of this research is how to guarantee human rights for domestic workers through work agreements in Surabaya? This study uses a qualitative approach. The research activity was in the West Surabaya area. The research subjects are domestic workers who work part-time and don't spend the night at the owner's home(pocokan). Data are collected using literature review techniques and in-depth interviews. The results show that many domestic workers work agreements are neglected. It needs legal protection of domestic workers, which intends to guarantee their fundamental rights, equal opportunity and treatment without discrimination to have better welfare for domestic workers and their families.

Keywords: Domestic Workers; Employment agreement; Basic rights.

Rifa' Rosyaadah; Rahayu

(Protection of Women's Human Rights Against Cases of Households Violence in Indonesia Based on the Perspective of International Law)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 261-272

The Indonesian government has signed a declaration on the Elimination of Violence Against Women (1993) since 2014. However, at a technical level, violence against women still often occurs due to domestic violence in Indonesia. This writing aims to know the implementation of the law and protection of women's human rights against domestic violence in the view of international law. The method used in this research is normative juridical. The results show that the entry of the public legal system into the domestic realm, namely domestic life, is one of the new developments in human rights, especially in Indonesia. Household affairs, which were initially private matters where the State was not allowed to regulate them, have become the responsibility of the State to handle them. It is the domain of public law as stipulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords: domestic violence; human rights; women.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ricky Santoso Muharam, Danang Prasetyo

(Womens Political Rights Fulfilment to become Supervisor The 2020 Simultanous Regional Heads Election)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 273-284

This study discusses women's political rights as supervisors of regional head elections in the Bantul Regency Election Supervisory Agency from the district to the hamlet level. The research uses a qualitative approach with in-depth analysis that emphasizes on process and meaning. Primary data comes from the Election Supervisory Board of Bantul Regency and secondary data comes from various documents, laws and regulations, books, journals and research reports. This study found that some women's political rights as election supervisors have been fulfilled in accordance with the regulations governing the representation of women as election supervisors. The fulfilment of women's political rights as supervisors, especially in the 2020 Bantul Pilkada, has been regulated in Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. However, based on the 2020 Bantul Pilkada, several elements of women's representation cannot be fully fulfilled, such as the case of women's political rights as Village/Kelurahan Supervisors. Apart from gender issues, the risk burden as a supervisor is also quite heavy. The duties and responsibilities as supervisors are very different from those of other election organizers, for example, in the General Election Commission, District Election Committee, Voting Committee, and Voting Organizer Group.

Keywords: womens political rights; election supervisors; regional head elections.

Frischa Mentari Safrin

(Fulfillment of Human Right In The Program Of Women Inmate's Self-Reliance Development In The New Normal Era)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 285-304

A new normal era that provides a different lifestyle from before the Covid-19 pandemic makes all organizational settings change significantly. Correctional Institutions must create strategies for the welfare of inmates to implement health protocols. In providing work guidance, prisons should also pay attention to the right to a sense of security and comfort for inmates. Because in this new normal era, every human being is entitled to feel safe in work. The provision of a self-reliance coaching program that aims to make inmates get their right to live their interests and talents. This research aims to provide strategies related to human rights understanding in the new normal era of work guidance to keep the work guidance program running by using online & offline classes. The program can continue to run and increase the productivity of the organization. This research is qualitative and descriptive approach, illustrated by narratives involving primary & secondary data. This study concludes that the prison made a policy within the duration of the work guidance that produced a good impact and still comply with health protocols for third parties who enter prison. This scientific work is expected to help the enforcement of inmate rights because of the different circumstances in each city/country.

Keywords: human rights; correctional institutions; self-reliance development; new normal.

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Ari Wirya Dinata, M. Yusuf Akbar

Limitation Of The Rights To Move Through Entry Regulation And Travel Restrictions During Covid-19 Virus Outbreak Under International Law And Indonesian Law

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 305-324

The World Health Organization (WHO) declared Covid-19 as a Pandemic on March 11, 2020. Several countries have already issued several policies to decline the spread of the virus. One of these policies is entry regulation and travel restrictions. This policy aims to prevent the transmission and spread of the virus due to human movement. On the other hand, human rights conventions protect the right to move and enter a country and prohibit discrimination. This paper reviews the perspective of international law concerning entry regulation policy and discusses Indonesia's domestic policy in dealing with the outbreak. This paper uses the normative juridical method with secondary data. It consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This paper summarizes that state policy regarding entry regulation and travel ban restrictions are allowed under international law. It had already made an impact by reducing the number of corona outbreaks across national borders. However, this policy may violate human rights if it does not refer to applicable legal provisions and other human rights conventions. This paper suggests that policymakers be aware and careful in using the entry regulation policy.

Keywords: Human Rights; Entry Regulation and Travel Ban Restriction; Covid-19.

Witri Elvianti, Dibyana Galih Prakasita

Human Rights Violation in the Mining Exploration Cooperation between Chinese Consortium Companies and the Government of Democratic Republic of Congo

Human Rights Journal, Volume 12, Number 2, August 2021, page 325-348

China's economic bilateral cooperation with the Democratic Republic of Congo (DRC) has been agreed through a Collaboration Agreement in 2008. China's government previously had promised that such cooperation would bring benefits to the improvement of the welfare of local population through infrastructures in Congo. However, the agreement causes controversy due to the probability of human rights violations by Chinese mining companies. This study was designed as qualitative research and aimed at analyzing whether or not human rights perspective appeared on PRC-Kongo Collaboration Agreement 2008. Using content analysis technique, data collection is done through analysis from the Cooperation Agreement. It found that although China has shown its commitment to support human development in Africa, this commitment does not appear on China's Collaboration Agreement with Congo. It also argues that the outcome of mineral mining for infrastructure does not suit a win-win solution so that it deteriorates human development in Congo. Furthermore, China's mining companies seem to neglect the risk of employing children as its cheap labour, which potentially worsen China's commitment on human rights. It also analyzed that China perceived its national strategic plan as the priority rather than the universal principle of human rights.

Keywords: China; child labor; mineral exploration; Kongo.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

Persamaan Hak Atas Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Zonasi

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 179-192

Klasterisasi yang muncul karena adanya jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/wali memiliki implikasi terhadap tercederainya hak atas pendidikan khususnya dalam memilih fasilitas pendidikan secara bebas dan leluasa, hal itu dihambat oleh adanya persentasi zonasi yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Problematika hak atas pendidikan itu muncul karena lebih mengutamakan aspek 'jarak' di bandingkan 'kognitif', bahkan peluang ekonomi yang tidak mampu jauh lebih sedikit dibandingkan zonasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji adanya problematika ekualitas hak atas pendidikan sejak diterapkannya sistem zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan itu berimplikasi terhadap tidak terpenuhinya hak atas pendidikan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa dalam proses penerimaan siswa baru harus mempertimbangkan 'nilai' sebagai kuota terbanyak terhadap daya tampung sekolah, kemudian diikuti oleh jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali untuk menciptakan ekualitas hak atas pendidikan yang proporsional dan berkeadilan.

Kata kunci: zonasi; hak; pendidikan.

Yuliyanto, Donny Michael, Penny Naluria Utami (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Deradikalisasi Narapidana Teroris Melalui Individual Treatment

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 193-208

Radikalisme yang dilakukan oleh teroris, baik individu maupun kelompok, jika tidak dilakukan penanganan yang serius, dampak negatifnya akan semakin meluas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan perlakuan individu terhadap narapidana teroris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pemangku kepentingan. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui regulasi terkait pembinaan narapidana teroris. Studi ini menemukan bahwa deradikalisasi narapidana teroris melalui perlakuan individu dilakukan dengan pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan penyuluhan. Pembinaan dilakukan secara individu di ruang / sel penjara. Pemilahan narapidana dalam rangka penempatan didasarkan pada penilaian tingkat risiko setiap narapidana. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah program pembinaan kepribadian terhadap narapidana teroris melalui perlakuan individu. Melalui penelitian ini, penulis ingin memberikan kontribusi kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk lebih meningkatkan kualitas pembinaan terhadap narapidana teroris; dan membangun kerjasama dengan instansi lain dalam menangani narapidana teroris di Indonesia.

Kata kunci: deradikalisasi; narapidana teroris; perlakuan individu.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Yeni Rosdianti (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Quo Vadis Komisi Nasional Disabilitas?

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 209-226

Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegiat disabilitas secara nasional. Penempatan Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas di bawah Kementerian Sosial ini memunculkan kembali pertentangan tentang konsep disabilitas sebagai urusan sosial terhadap konsep disabilitas sebagai urusan hak asasi manusia. Makalah ini menggunakan tinjauan yuridis normatif yang menerapkan pendekatan deduktif dalam menganalisis data dan peraturan perundang-undangan terkait. Makalah ini menguraikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menelaah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, telaah ini juga merujuk pada konsep yang terbaru dan komprehensif dari United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) serta Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles) sebagai 'soft law' yang secara khusus berisi ketentuan pembentukan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Studi ini menemukan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) kurang sejalan dengan tujuan keseluruhan pendekatan disabilitas berbasis hak asasi manusia. Selain itu, makalah ini menyarankan untuk memperkuat KND melalui mandat yang luas yang menetapkan komposisi dan lingkup kompetensinya, dengan mempertimbangkan disabilitas sebagai urusan lintas bidang, bukan hanya urusan sosial semata. Lembaga nasional ini harus memiliki kompetensi untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

Kata Kunci: penyandang disabilitas; hak asasi manusia; Komisi Nasional Disabilitas (KND); hak-hak disabilitas.

Putra Perdana Ahmad Saifulloh (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 227-244

Berdasarkan potret buruk pemenuhan hak atas pangan, maka penelitian ini mengusulkan penguatan norma jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan dalam rencana Amandemen Kelima UUD 1945. Tujuan penelitian ini agar dimuatnya hak atas pangan sebagai materi muatan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian ini: UUD 1945 mengalami kelemahan, terutama pengaturan dalam jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan yang tidak secara eksplisit diatur. Yang diperkuat dengan fakta-fakta beberapa kasus krisis pangan di Indonesia memberikan justifikasi bahwa eksistensi hak atas pangan urgen dimuat dalam Amandemen UUD 1945 Kelima untuk memperkuat hak atas pangan dalam konstitusi dan amandemen konstitusi juga memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan. Dalam amandemen tersebut, Penulis menilai memberikan kepastian hukum kepada warga negara agar haknya di bidang pangan lebih terjamin. Sehingga bisa dikatakan bahwa UUD 1945 adalah Konstitusi Pangan.

Kata kunci: konstitusi pangan; amandemen kelima UUD 1945; hak atas pangan.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Siti Maizul Habibah, Oksiana Jatningsih, Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba (Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Jaminan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 245-260

Permasalahan yang terjadi pada pekerja rumah tangga (PRT) salah satunya adalah tentang Jaminan Hak asasi manusia (HAM) tidak mendapat perhatian. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 tidak mencakup PRT, yang artinya PRT tidak tercakup dalam perlindungan tenaga kerja. Hubungan yang terjadi antara PRT dengan majikan adalah hubungan informal dan karena itu tidak ada ketentuan hukum yang dihadirkan untuk mengatur hubungan mereka. rumusan penelitian ini ialah bagaimana Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara teritori kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah Surabaya Barat. Subjek penelitian adalah pekerja rumah tangga yang bekerja paruh waktu dan tidak bermalam (pocokan). Data dikumpulkan dengan teknik literature review dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian kerja oleh PRT banyak yang terabaikan dan masih perlu perlindungan hukum perihal hak dan kewajiban PRT dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasarnya serta menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan PRT dan keluarganya.

Kata kunci: Pekerja Rumah Tangga (PRT); Perjanjian kerja; Hak-hak dasar.

Rifa' Rosyaadah; Rahayu (Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang)

Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 261-272

Pemerintah Indonesia telah menandatangani deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (1993) sejak tahun 2014. Namun dalam tataran teknisnya, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui pelaksanaan undang-undang dan perlindungan HAM perempuan terhadap KDRT dalam pandangan Hukum Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan masuknya sistem hukum publik ke ranah domestik yaitu kehidupan rumah tangga adalah salah satu perkembangan baru di bidang HAM khususnya di Indonesia. Urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dimana negara tidak boleh mengaturnya kini berubah menjadi tanggung jawab negara untuk mengaturnya yang kini menjadi ranah dari hukum publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata kunci: KDRT; HAM; perempuan.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Ricky Santoso Muharam, Danang Prasetyo (Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta)

Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 273-284

Penelitian ini membahas tentang hak politik perempuan sebagai pengawas pemilihan kepala daerah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dari tingkat kabupaten sampai tingkat dusun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam yang menonjolkan proses dan makna. Data primer berasal dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, regulasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hak-hak politik perempuan sebagai pengawas Pemilu sudah terpenuhi sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu. Pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengawas khususnya pada Pilkada Bantul 2020 sebetulnya secara regulasi sudah diatur di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun berdasarkan Pilkada Bantul 2020 beberapa faktor unsur keterwakilan perempuan tidak dapat terpenuhi secara utuh seperti kasus hak-hak politik perempuan sebagai Pengawas Desa/Kelurahan. Selain karena masalah gender, adanya beban resiko sebagai Pengawas juga cukup berat. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sangat berbeda dengan tugas penyelenggara Pemilu lainnya misalnya di Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Kata Kunci: hak politik perempuan; pengawas pemilu; pemilihan kepala daerah.

Frischa Mentari Safrin (Politeknik Ilmu Pemasarakatan)

Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan di Era Normal Baru

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 285-304

Era normal baru yang memberikan pola hidup yang berbeda dari sebelum masa pandemi Covid-19 membuat semua tatanan organisasi mengalami perubahan yang signifikan. Lembaga Pemasarakatan harus membuat strategi dalam kesejahteraan narapidana untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam pemberian bimbingan kerja, Lapas juga harus memperhatikan hak atas rasa aman dan nyaman bagi narapidana. Karena dalam era normal baru ini, menjadikan setiap insan untuk berhak merasakan keselamatan dalam bekerja. Pemberian program pembinaan kemandirian yang bertujuan menjadikan narapidana mendapatkan haknya untuk menjalani minat dan bakatnya. Tujuan penelitian ini untuk memberikan strategi terkait pemenuhan HAM dalam bimbingan kerja di era normal baru agar program bimbingan kerja tetap berjalan, dengan menggunakan online & offline class, program tersebut dapat terus berjalan bahkan meningkatkan produktivitas organisasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dan pendekatan deskriptif, digambarkan dengan narasi yang melibatkan data primer dan sekunder. Sebuah kesimpulan dari penelitian ini, pihak Lapas membuat kebijakan dalam durasi bimbingan kerja yang menghasilkan dampak baik, serta dengan mematuhi protokol kesehatan untuk melakukan swab test dan screening bagi pihak ketiga ketika masuk kedalam. Karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu penegakan hak narapidana, mengingat keadaan yang berbeda pada setiap kota/negara.

Kata Kunci: HAM; lembaga pemasarakatan; pembinaan kemandirian; normal baru.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Ari Wirya Dinata, M. Yusuf Akbar (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu)

Pembatasan Hak Untuk Bergerak (Right To Move) Melalui Larangan Masuk dan Pembatasan Perjalanan Selama Penyebaran Virus Covid-19 Menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 305-324

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi pada 11 Maret 2020. Sejumlah negara telah membuat berbagai kebijakan untuk menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu kebijakan tersebut adalah regulasi masuk dan pembatasan perjalanan. Kebijakan ini dipandang perlu untuk mencegah penularan dan penyebaran virus secara masif akibat pergerakan manusia. Di sisi lain, konvensi hak asasi manusia memberikan perlindungan terhadap hak untuk bergerak dan memasuki suatu negara dan melarang tindakan diskriminasi. Tulisan ini mengkaji perspektif hukum internasional tentang kebijakan masuk dan pembatasan perjalanan serta membahas kebijakan domestik Indonesia dalam menanggulangi wabah korona. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tulisan ini merangkum bahwa kebijakan negara mengenai pengaturan masuk dan pembatasan larangan bepergian merupakan sesuatu yang dibolehkan menurut hukum internasional. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah wabah korona lintas batas negara. Meskipun demikian, kebijakan ini mungkin melanggar hak asasi manusia jika tidak mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku seperti konvensi hak asasi manusia. Tulisan ini menyarankan kepada para pembuat kebijakan untuk berhati-hati dalam menggunakan kebijakan entry regulation.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pembatasan Perjalanan dan Masuk; Covid-19.

Witri Elvianti, Dibyana Galih Prakasita (Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Humaniora Universitas Presiden)

Pelanggaran HAM dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral Antara Konsorsium Perusahaan Tiongkok dan Pemerintah Kongo

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 2, Agustus 2021, hal 325-348

Kerjasama ekonomi bilateral Tiongkok dengan Republik Demokratik Kongo (Kongo) telah disepakati melalui *Collaboration Agreement* pada tahun 2008. Pemerintah Tiongkok menjanjikan bahwa kerjasama tersebut akan membawa manfaat bagi kesejahteraan penduduk lokal melalui pembangunan infrastruktur di Kongo. Meskipun demikian, perjanjian kerjasama tersebut justru menuai kontroversi dikarenakan beberapa analisis yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap perlindungan HAM di Kongo oleh perusahaan konsorsium Tiongkok. Kajian ini didesain dengan metode penelitian kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis apakah Perjanjian Kolaborasi PRC-DRC 2008 sesuai dengan prinsip HAM universal. Dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*), peneliti mengumpulkan data dengan menelaah isi dari perjanjian kerjasama tersebut. Ditemukan bahwa meskipun pemerintah Tiongkok menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan manusia di Afrika namun komitmen tersebut justru tidak muncul dalam Perjanjian Kolaborasi yang memayungi kerjasama bilateral Tiongkok dan Kongo dalam eksplorasi mineral. Tulisan ini juga mengemukakan bahwa hasil penambangan mineral untuk infrastruktur tidak sesuai dengan *win-win solution* yang kemudian dapat memperburuk pembangunan manusia di Kongo. Perusahaan pertambangan Tiongkok yang tampak mengabaikan risiko mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja murah berpotensi memperburuk komitmen Tiongkok pada hak asasi manusia. Dianalisis dari sisi kepentingan nasional Tiongkok, kepentingan bisnis dan perdagangan tetap menjadi prioritas utama daripada kepatuhan pada prinsip universal hak asasi manusia.

Kata kunci: Pemerintah Tiongkok; pekerja anak; eksplorasi mineral; Pemerintah Republik Demokratik Kongo.